DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA MOJOGEDANG

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Nominal Rupiah yang tertera dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan nominal Rupiah
2	Nominal Rupiah yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan nominal Rupiah
3	Biodata elektronik ASN (database) / Perangkat Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN/ Perangkat Desa yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN/Perangkat Desa yang bersifat rahasia
4	Dokumen/Database/Arsip ASN /Perangkat Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
5	Identitas ASN/Perangkat Desa yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
6	Identitas ASN/Perangkat Desa yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
7	Data Tentang Tanah Kas Desa Secara Rinci	UU 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	Merugikan Pemerintah Desa	Melindungi data Tanah kas Desa
8	Data rekam medik pasien di Desa	- UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j, - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47, - Peraturan Menteri Kesehatan Rapublik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 dan 13 UU	Tidak terbatas	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
9	Data hutang pasien (di wilayah desa) kepada RS	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Tak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
11	Dokumen Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
12	Dokumen Penawaran Kontrak	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Etika Pengadaan.	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
13	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulan tanah
14	Lokasi Server	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk / ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
15	Internet Protocol /IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk / ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
16	Bandwidth Management	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk / ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwide
17	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
18	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
19	Sistem Management Database	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Database
20	Hasil Pemeriksaan : - Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan, - Evaluasi/Pemantauan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.	Tidak terbatas	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP. - Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
21	Surat PertanggungJawaban (SPJ) Pelaksanaan Keuangan Daerah yang belum diaudit	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan dokumen
22	Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa.	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
23	Penetapan Keputusan Kepala Desa yang bersifat rahasia.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan batas waktu Keputusan tersebut dicabut.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/Negara dan dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi rahasia pribadi/Negara, serta memperlancar proses penyusunan kebijakan.
24	Penetapan Keputusan Kepala Desa yang bersifat perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan batas waktu izin tersebut berlaku.	Berkaitan dengan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi rahasia perusahaan, sehingga dapat berkembang dengan baik.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
25	Berkas perkara PTUN dan perkara Perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a dan Huruf i	Sampai dengan keputusan inkrahct / mempunyai kekuatan hukum tetap.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Memperlancar proses penegakan hukum.
26	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 - TAP MPRS No. 22 Th 1966	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
27	Laporan Hasil Pengawasan, terdiri dari : a. Laporan Hasil Pemeriksaan, b. Laporan Hasil Review; dan c. Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring	a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; b) PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c) PP Nomor 12 Th 2017 ttg Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 Ayat (2); d) Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah; e) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia : STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN No. 4060 - Pendistribusian Hasil Audit Intern;	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
28	Database Obyek Pajak dan Retribusi	- UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamanakan database Obyek pajak dan retribusi
29	Data hasil check up perorangan ASN / pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
30	Data hasil Evaluasi Kinerja ASN / pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
31	Data Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan	- UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j - UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
32	Identitas ASN/Perangkat Desa yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
33	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
34	Penderita HIV / AIDS	- Kesepakatan WHO - Permenko Kesra II/2009 - Perda no 5 / 2009 - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	- Bertentangan dengan kesepakatan internasional - Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia -	Melindungi HAM dan menghindari dari stigma dan diskriminasi
35	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1 - UU No. 29 Tahun 2004 ttg Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat 2	Atas perintah hakim / pengadilan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
36	Laporan kasus penyakit pasien	UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
37	Diagnosis penyakit pasien	UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
38	Biodata Individu dan data Keluarga : a. Kependudukan b. Ketenagakerjaan c. Transmigrasi	- UU No. 23 Th. 2006 tentang Kependudukan - UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan huruf j	Tidak terbatas	Mengungkap Rahasia Pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi setiap warga Negara Indonesia dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
39	Dokumen proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum
40	Data pribadi penduduk / data perseorangan dan dokumen kependudukan	UU 24 Tahun 2013 Pasal 79 angka 1, Pasal 84 angka 1 dan 2	Tidak terbatas	Menimbulkan permasalahan hukum karena data-data tersebut wajib disimpan dan dilindungi keabsahannya oleh negara	Data pribadi seseorang terlindungi, terjaga keabsahannya dan hanya boleh diakses oleh lembaga-lembaga pengguna dengan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ruang lingkup data yang diperlukan.
41	Identitas Korban Tindak Kekerasan	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan
42	Identitas Pasien yang Direhabilitasi terkait Penyalahgunaan Narkoba	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Membantu mempercepat proses rehabilitasi

KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU ATASAN
PENGELOLA INFORMASI DESA

NYONO